

**ANALISIS HUKUM PADA LOAN AGREEMENT
ANTARA INDONESIA DAN WORLD BANK DALAM
PENERAPAN ASAS KEDAULATAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU
(1969-1998)**

(Yanvino, 1210112084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86+xi halaman, 2016)

ABSTRAK

Pada awal kemerdekaan, Indonesia yang berstatus sebagai *lower middle income country* mengajukan keanggotaannya pada *World Bank* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954. *Indonesia* sebagai anggota *World Bank*, untuk meminjam dana pembangunan harus melalui mekanisme perjanjian yang disebut *Loan Agreement*. Namun *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia mendapat banyak kritik dari berbagai pihak khususnya mengenai Pasal-Pasal yang terdapat pada *Loan Agreement* tersebut, karena diduga telah melanggar Asas Kedaulatan Negara. Untuk itu Penelitian ini ingin melihat: 1) Apakah *Loan Agreement* antara *Indonesia* dengan *World Bank* telah sesuai dengan kepentingan negara; 2) Apa dampak yang ditimbulkan oleh *Loan Agreement* antara *Indonesia* dengan *World Bank* terhadap kedaulatan negara *Indonesia*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Loan Agreement* yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Loan Agreement* yang dibuat pada tahun 1969-1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Loan Agreement* antara *Indonesia* dan *World Bank* yang dibuat pada masa Pemerintahan Orde Baru ternyata telah sesuai dengan kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan pada masa itu telah didasarkan pada kebijakan Pemerintah berupa Repelita. Namun pada *Loan Agreement* tersebut mengandung beberapa klausul yang telah melanggar Asas Kedaulatan Negara, baik dari aspek kedaulatan ekonomi, hukum, dan territorial. Hal ini membuat posisi *Indonesia* tidak dapat bergerak secara leluasa sebagai negara yang berdaulat.

Kata Kunci: *Indonesia*, *World Bank*, *Loan Agreement*, Kedaulatan Negara.

LEGAL ANALYSIS OF LOAN AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND THE WORLD BANK IN IMPLEMENTATION OF THE STATE SOVEREIGNTY PRINCIPLES DURING THE NEW ORDO (1969-1998)

(Yanvino, 1210112084, Law Faculty Andalas University, 86+xi pages, 2016)

ABSTRACT

At the beginning of independence, Indonesia as a lower middle income country apply for membership in the World Bank through Act No. 5 of 1954. Indonesia as a member of the World Bank, to borrow the funds of development must be through a mechanism called Loan Agreement. However Loan Agreement signed by the Government of Indonesia has received much criticism from various parties, especially the clauses contained in the Loan Agreement, for allegedly has violated the principle of State Sovereignty. Therefore this research wanted to see: 1) Is the Loan Agreement between Indonesia and the World Bank in accordance with the interests of the state; 2) What is the impact of the Loan Agreement between Indonesia and the World Bank concerning the Indonesian sovereignty. This research is a normative juridical with statute approach, historical approach, and the conceptual approach. Loan Agreement which is the focus of this research is the Loan Agreement made in 1969-1998. The results showed that the Loan Agreement between Indonesia and the World Bank were created in the New Order have been in accordance with the national interest. This is because development at that time was based on the Government's policy which is Repelita. But in the Loan Agreement contains a number of clauses that have violated the principle of State Sovereignty, both from the aspect of economic sovereignty, law and territorial. This makes the position of Indonesia is not able to move freely as a sovereign state.

Key Word: Indonesia, *World Bank*, *Loan Agreement*, *State Sovereignty*

